

KERAWANAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF INKLUSIF

Oleh : Indra Kertati, email : indra-kertati@untagsmg.ac.id

Harsoyo, email : harsoyo24@yahoo.co.id

Abstract

Social insecurity does not choose place, time or target. Everyone can become a victim and everyone has the choice to take action or not to commit a criminal act that results in social unrest. Social insecurity can occur in various perspectives. The causes also vary from social, environmental, cultural conditions, habits that are continuous without being cut off, health and other vulnerable conditions. Social vulnerability must be viewed from an inclusive perspective, because it is the right of citizens to secure a sense of security in their life. This study reveals a social vulnerability handling model that can be used in the management of developing social conflicts. The aim of this research is to get a situation description, analysis and recommendations in controlling social vulnerability in an inclusive perspective with the locus of the city of Surakarta. The results of this study indicate that the most effective treatment for social insecurity starts from early detection. This model continues to be developed so that the basis of this model, namely accurate information can be found and applied immediately.

Keywords: crime, vulnerability, social, inclusive, model, detective, early.

Abstrak

Kerawanan sosial tidak memilih tempat, waktu dan sasaran. Semua orang dapat menjadi korban dan semua orang memiliki pilihan untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan kriminal yang mengakibatkan kerawanan sosial. Kerawanan sosial dapat terjadi dalam berbagai perspektif. Penyebabnya pun juga bervariasi dari kondisi sosial, lingkungan, budaya, kebiasaan yang terus-menerus tanpa terpotong, kesehatan dan kondisi rentan lainnya. Kerawanan sosial harus dipandang dalam perspektif inklusif, karena menjadi hak warga negara untuk mendapatkan jaminan rasa aman dalam berkehidupan. Penelitian ini mengungkapkan model penanganan kerawanan sosial yang dapat digunakan dalam pengelolaan konflik-konflik sosial yang berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran situasi, analisis dan rekomendasi dalam pengendalian kerawanan sosial dalam perspektif inklusif dengan lokus kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan kerawanan sosial paling efektif dimulai dari deteksi dini. Model ini yang terus dikembangkan agar basis dari model ini yaitu informasi yang akurat dapat segera ditemukan dan diaplikasikan.

Kata kunci : kriminalitas, kerawanan, sosial, inklusif, model, deteksi, dini.

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk Indonesia melaju dengan cepat. Perkembangan penduduk yang cepat membawa konsekuensi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, lahan untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain kebutuhan tersebut, perkembangan jumlah penduduk juga berdampak terhadap pergeseran penduduk, migrasi, persoalan sosial dan perubahan wajah kota.

Perkembangan yang makin nyata dari dampak pertumbuhan penduduk adalah makin beragamnya kerawanan sosial, seperti konflik kecil antara individu, antara kelompok anak-anak, kelompok masyarakat, hingga konflik besar menyangkut negara dan masyarakat. Konflik sosial berkembang terus dari yang paling sederhana, seperti pembagian sembako, perebutan bantuan sosial, hingga konflik besar menyangkut kepentingan kelompok tertentu, ketidakpercayaan kepada pemerintah, hingga konflik ras, etnis, dan agama yang memicu kondisi yang mengkhawatir masyarakat.

Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018. Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016-2018 juga memperlihatkan pola yang fluktuatif. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2016 menjadi 1,08 persen pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 1,11 persen pada 2018. Berdasarkan data Podes, selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.

Angka kerawanan dan kriminalitas ini hampir merata terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia tidak terkecuali Kota Surakarta. Jumlah kejahatan di

Kota Solo selama 2019 sebanyak 758 kasus atau turun sekitar 16,24 persen dibanding 2018 sebanyak 905 kasus. Jumlah kejahatan selama 2019 ini, ada 758 kasus, sedangkan yang dapat diselesaikan atau terungkap sebanyak 542 kasus. Sejumlah kejahatan di Kota Solo tersebut tindak pidana yang menonjol antara lain pencurian pemberatan (curat) sebanyak 72 kasus atau naik dua kasus dibanding tahun sebelum, pencurian sepeda motor (curanmor) 86 kasus atau naik 15 kasus, penipuan naik dari 80 kasus menjadi 92 kasus dan yang berhasil diselesaikan 87 kasus. Jumlah kasus narkoba tahun 2019. Kasus kecelakaan lalu lintas selama tahun 2019 juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas naik dari 50 kasus menjadi 942 kasus. Korban meninggal sebanyak 59 orang, luka berat dua orang, ringan 984 orang dengan kerugian materi sebanyak Rp 462,25 juta.

Kota Surakarta adalah kota yang dinamis dalam perubahan sosial dan budaya, memiliki keanekaragaman yang mewakili Indonesia, dimana berbagai suku bangsa, ras, bahasa, agama dan istiadat berada di kota ini. Disisi lain, Kota Surakarta merupakan bagian dari Solo Raya yang menjadi pusat bagi wilayah-wilayah satelit disekitarnya yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten dimana segala macam kepentingan sosial, politik, dan ekonomi, berbaaur saling mempengaruhi.

Berbagai konflik sosial dan kriminalitas yang terjadi di Kota Surakarta menjadikan kota ini sebagai daerah merah. Konflik sosial meskipun sudah tidak lagi sampai pada *rush* dan kerusuhan, masih ada konflik kecil-kecil yang berhasil massa dan diredam aparat kepolisian, dan kondisi beberapa tahun terakhir aman. Konflik-konflik kecil terjadi namun tidak meluas, mendendam dan memicu kemarahan sosial. Justru angka kriminalitas yang cukup mengkhawatirkan.

Tingginya angka kriminalitas ini dipicu juga oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat. Harus diakui bahwa kriminalitas yang terjadi merupakan patologi sosial. Patologi sosial adalah masalah sosial, disorganisasi sosial/social disorganization/disintegrasi sosial, social maladjustment, sociopathic, abnormal,

atau *sociatry/sosiatri*. Patologi adalah semua tingkah laku sosial (masyarakat) yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Patologi sosial adalah suatu gejala ketika tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya. Jika demikian persoalan kriminalitas menjadi jamak dengan kondisi patologi yang berkembang. Situasi ini bukan hanya terjadi pada kriminalitas yang ditangani, namun juga meluas pada kerawanan baik yang dilakukan masyarakat maupun kelompok inklusi. Kelompok inklusi, bisa jadi sebagai pelaku maupun sebagai korban. Permasalahan yang mengemuka menjadi bias dan meluas, karena kerawanan sosial akan mengarah dan menyasar pada berbagai kelas sosial. Oleh karena itu secara khusus penelitian ini berfokus pada perspektif inklusif, tanpa meninggalkan kondisi umum sebagai deskripsi terhadap kerawanan sosial yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran situasi, analisis dan rekomendasi dalam pengendalian kerawanan sosial dalam perspektif inklusif dengan lokus kota Surakarta.

PERMASALAHAN

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4),

Amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Rasa tidak aman berangkat dari kekawatiran akan kondisi kerawanan yang terjadi. Terlebih jika rasa tidak aman menimpa pada kelompok inklusif yang selama ini belum tentu mendapatkan perhatian yang spesifik, karena kebutuhan spesifiknya. Inklusif adalah memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan kata lain, jika kata eksklusif datang untuk membuat sebuah kesenjangan sosial, maka kata inklusif datang untuk menyamaratakan semua orang dan mau berusaha untuk mengerti semua sudut pandang yang dimiliki oleh orang lain. Kelompok inklusi adalah kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Dalam hal perspektif inklusif maka kerawanan sosial tidak mengenal pembatas. Dengan demikian permasalahan menjadi berkembang, mengingat bahwa kerawanan sosial bukan hanya menimpa kelompok umur tertentu atau bahkan dalam stratifikasi sosial, namun lebih luas pada seluruh masyarakat termasuk dalam kategori inklusi. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana model penanganan kerawanan sosial dalam perspektif inklusif ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dan deskriptif telah menjadi prosedur yang sangat umum dalam melakukan penelitian di banyak disiplin ilmu, termasuk pendidikan, psikologi, dan ilmu sosial. Tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Oleh karena itu, alat observasi dan survei sering digunakan untuk mengumpulkan data (Gall, Gall, & Borg, 2007).

Deskriptif kualitatif adalah tradisi penelitian yang dikutip secara luas dan telah diidentifikasi sebagai penting dan sesuai untuk pertanyaan penelitian yang difokuskan pada menemukan siapa, apa, dan di mana kejadian atau pengalaman dan mendapatkan wawasan dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami. Ini juga merupakan label pilihan ketika deskripsi langsung dari suatu fenomena diinginkan atau informasi dicari untuk mengembangkan dan menyempurnakan kuesioner atau intervensi (Neergaard et al., 2009; Sullivan-Bolyai et al., 2005).

Sebagaimana pendekatan yang dilakukan maka pengumpulan data selain menggunakan data sekunder, dilakukan pula dengan menggunakan data primer yaitu observasi dan wawancara mendalam. Trianggulasi data dilakukan baik dari metode maupun dari pengumpulan data, dan analisis data. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan klasifikasi dan interpretasi atas temuan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerawanan Sosial ialah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tersebut. Ketidakpuasan ini masih dalam eskalasi aman sehingga hanya diperlukan tindakan pencegahan. Ketidakpuasan pemecahan masalah dari yang tidak tepat dicegah akan memicu keresahan, demonstrasi/anarkis ataupun separatisme.

Berdasarkan hasil penelitian kerawanan sosial Kota Surakarta dapat dibedakan dalam 6 (enam) yaitu : Kerawanan sosial budaya, Kerawanan Lingkungan Hidup, Kerawanan Idiologi, Kerawanan RAS dan Agama, Kerawanan Ekonomi dan Kerawanan Kesehatan. Kerawanan sosial budaya menyangkut tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenakalan remaja, narkoba, dan permainan *games online* yang memicu kekerasan antar kelompok. Hasil penelitian menunjukkan kenakalan remaja yang terjadi sepanjang tahun 2015-2019 adalah: (1) penganiayaan. (2) tindakan kekerasan (3) pelecehan seksual (4) penghinaan (5) penggelapan (6) pencurian (7) pengancaman (8) penipuan (9) menjual miras tanpa ijin (10) mabuk di tempat umum, (11) mengemis (12) menjajakan diri (13) melanggar aturan lalu lintas (14) penyalahgunaan narkoba dan (15) membolos sekolah saat jam pelajaran.

Kerawanan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Surakarta menyangkut bencana banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta mewaspadaikan 21 kelurahan di Solo sebagai wilayah rawan banjir. Sebanyak 21 kelurahan yang dinilai rawan banjir itu tersebar di lima kecamatan, antara lain di Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari Kelurahan Semanggi, Sangkrah, Kedung Lumbu, Joyosuran dan Pasar Kliwon, di Kecamatan Laweyan ada Kelurahan Panularan, Bumi, Pajang, sedangkan di Kecamatan Serengan ada Kelurahan Joyontakan, Tipes dan Serengan, untuk Kecamatan Banjarsari ada Kelurahan Sumber, Banyuanyar, Gilingan, Nusukan, Kadipiro dan di Kecamatan Jebres ada Kelurahan Mojosongo, Gandekan, Sewu, Pucangsawit, Jebres.

BPBD Kota Surakarta juga mewaspadaikan empat sungai itu yakni Kali Pepe di wilayah utara, Kali Jenes dan Kali Premulung di wilayah selatan, serta Bengawan Solo untuk wilayah timur yang rawan sekali meluap pada saat curah hujan tinggi. BPBD sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan juga kelurahan-kelurahan terdampak dalam mengantisipasi luapan air nantinya.

Kerawanan politik pernah terjadi yaitu kerusuhan massal di Surakarta pada tanggal 20 Oktober 1999 saat Pemilihan Presiden dan Megawati Soekarnoputri

yang pada waktu itu partainya yakni PDIP yang merupakan pemenang pemilu, gagal menghantarkan ketua umumnya menjadi presiden.

Kerawanan kesehatan berkaitan dengan penyakit yang diderita masyarakat terutama adalah kerawanan DBD yang sering terjadi kalangan masyarakat. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Efi S Pertiwi mengatakan berdasar data hingga pekan ke-18 tahun 2016, jumlah kasus DBD mencapai 248 kasus..Selain DBD, kasus HIV/AIDS juga cukup tinggi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Surakarta mengungkapkan, jumlah penderita HIV/AIDS di tujuh daerah eks Karesidenan Surakarta, yakni Kota Solo, Kab. Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Wonogiri dan Sukoharjo, pada 2015 lebih tinggi dibanding estimasi angka nasional. Data di KPA Nasional menyebutkan, penderita HIV/AIDS di tujuh wilayah tersebut sebanyak 1.356 kasus, sedang KPA Surakarta mendapati jumlahnya mencapai 1.738 kasus. Pengelola program KPA Surakarta, Tommy Prawoto, (29/11/2015) mengungkapkan kepada wartawan, tercatat sebanyak 490 pengidap HIV/AIDS telah meninggal dunia. Jumlah penderita HIV/AIDS yang merupakan warga Kota Solo asli diperkirakan sebanyak 370-an orang.

Kerawanan akibat RAS dan Agama, merupakan sejarah bagi kota Surakarta. Menurut catatan beberapa pelaku sejarah dan kajian yang dilakukan terhadap konflik ras cukup beragam dengan berbagai versi. Kota Surakarta merupakan kota yang pertama kali menciptakan peristiwa rasial anti Cina. Menurut Sejarawan, Sartono Kartodirdjo, pada tahun 1913 dicatat sebagai “lembaran terburam” dalam sejarah Indonesia, sejauh menyangkut kerusuhan-kerusuhan anti Cina (Rahardjo, 2005:104). Puncaknya pada Tragedi Mei 1998. Konflik etnis Tionghoa dan Jawa terus terjadi dan berulang yang biasanya disertai amukan massa (pembakaran, penjarahan, perkosaan dengan kekerasan). Berdasarkan catatan Harian Solo Heritage Community, Kota Solo di bakar massa sudah terjadi sebanyak tujuh kali yaitu: (1) Tragedi 22 Oktober 1965 Pembantaian 3 pelajar oleh pasukan PKI di depan Benteng Vastenburg oleh Batalyon 444 yang juga dikenal sebagai Batalyon Empat Refting; (2) Kerusuhan Krisis Pangan, 6 November 1966 Dimotori gerakan

pemuda kota membongkar gudang sembako di seluruh kota utamanya di Kawasan Tambak Segaran; (3) Tahun 1972 Gegeran abang becak vs pemuda Arab tahun 1972, berdampak di seluruh kawasan pertokoan pasar Pon dan Coyudan di bakar massa; (4) Insiden Kerusakan Pri vs Non Pri di Mesen Tahun 1980 Mengakibatkan munculnya kerusakan kota yang berkarakter dan bersifat endemis dan pathologis sebagai gejala awal munculnya penyakit sosial perkotaan di Solo; (5) Kerusakan Mei Kelabu 1998 Masih menggambarkan kerusakan secara endemis dalam ukuran jam, kerusakan meluas hingga kawasan eks karesidenan Surakarta dan sifat penyakit sosial pathologis kerusakan senantiasa kambuhan pada skala siklus 15 tahunan; (6) Kerusakan November Kelabu 1999 Amuk massa sebagai dampak kekalahan Megawati dalam pencalonan sebagai Presiden; dan (7) Amuk Massa Trek-trekan tahun 2001 Dilakukan oleh kalangan pemuda kota akibat kebut-kebutan di kota. Amuk ini berdampak dibakarnya kantor polisi di tingkat kawasan Gendengan. (Solopos, 17 Mei 2007)

Kerawanan sosial yang sering terjadi di di Kecamatan Pasar Kliwon adalah bencana banjir, bahkan di beberapa Kelurahan Seperti Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Kedunglumbu sudah menjadi langganan banjir di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena sering meluapnya Sungai bengawan solo, apabila curah hujan tinggi sungai bengawan solo meluap maka sudah dipastikan banjir akan menimpa kedua kelurahan tersebut. Hal tersebut diperparah dengan adanya bangunan liar yang ada di atas aliran sungai, bahkan bangunan tersebut sudah semi permanen. Pendangkalan sungai pun terus terjadi apabila bangunan liar di atas sungai tersebut tidak segera di tangani. Bajir di Kecamatan Pasar Kliwon telah mengakibatkan sebanyak 922 keluarga di tiga kelurahan mengungsi. Rumah mereka terendam banjir akibat hujan lebat lima jam sejak sabtu 18 Juni 2016. Beberapa waktu sebelumnya Dinas Pekerjaan umum telah melakukan mapping berkaitan dengan lokasi banjir di Surakarta dan ditemukan bahwa Pasar Kliwon adalah daerah rentan banjir musiman.

Persoalan lain yang cukup merepotkan dalam banjir musiman adalah sedimentasi pada sungai serta pemanfaatan bantaran sungai untuk keperluan

bangunan non permanen. Menurut Ria Pertiwi (40 tahun) anggota Linmas Kelurahan Kedunglumbu mengatakan "Pengerukan sungai secara swadaya masyarakat sudah pernah dilakukan tetapi tidak efektif karena yang melakukan adalah tenaga manusia, apabila menggunakan mesin berat pasti lebih efektif".

Beberapa orang di Kecamatan Pasar Kliwon juga rentan terhadap minum-minuman keras. Cerita tentang minuman keras seolah tiada habisnya. Selalu ada saja orang yang mengonsumsi minuman beralkohol itu sebagai bentuk pelampiasan untuk sejenak melupakan suatu permasalahan. Kejadian yang sering ditemukan adalah di Kelurahan Sangkrah, Buluwarti dan Kampungbaru. Sayangnya kondisi tersebut sulit untuk diatasi karena mereka melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi sementara masyarakat setempat acuh dan tidak peduli akan kejadian tersebut. Adalah ciu, miras tradisional buatan warga Bekonang, Sukoharjo yang selama ini menjadi miras kesukaan warga. Minuman tersebut dioplos dengan minuman berkarbonasi lainnya, miras racikan dianggap pemuda itu dapat membuat hari-hari bersama teman-temannya menjadi berwarna.

Kejadian kriminalitas berkaitan dengan alkohol terjadi di Kecamatan Pasar Kliwon. Pada tanggal 5 Maret 2016, yaitu seorang warga berinisial L (37) melakukan menembakan senjata air softgun beberapa kali ke Pos Linmas di Kauman dalam jarak dekat. Menurut Kapolsek Pasar Kliwon, Solo, AKP Nur Prasetyantoro W Utomo, menuturkan, pihaknya telah mengetahui identitas pelaku penembakan pos anggota lintas masyarakat atau Linmas di Kelurahan Kauman. Tidak ada motif apapun L melakukan penembakan itu. Hanya saja, menurutnya saat itu L dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman beralkohol.

Kejadian perzinahan juga pernah terjadi di kelurahan Gajah Kecamatan Pasar Kliwon. Menurut penuturan Linmas Kelurahan Gajah kejadian perzinahan marak di Kota Surakarta. Hanya saja sangat sulit diungkap. Salah satu kejadian di Kelurahan Gajah ini adalah bagian kecil dari kejadian-kejadian besar seperti gunung es.

Laweyan merupakan kecamatan memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga tingkat kerawanan sosial sering terjadi. Kerawanan sosial yang kerap terjadi ialah peredaran narkoba yang pernah terjadi di Kelurahan Karangasem

bertempat di sebuah rumah kos mahasiswa. Peredaran narkoba Surakarta sudah sampai batas yang mengkhawatirkan.

Masyarakat gemar pesta minuman keras di Kelurahan Sondakan, yang menganggap kebiasaan minum minuman keras merupakan suatu budaya sehingga sulit untuk diberantas. Minuman keras, mabok, pacaran seolah menjadi tayangan setiap hari yang tiada henti. Beberapa tempat menjadi sasaran pacaran bagi kaum muda-mudi. Salah satunya adalah Taman Sriwedari yang terletak di Jl Slamet Riyadi yang sering digunakan sebagai tempat pacaran dan hubungan homoseksual antara sesama laki-laki. Menurut penuturan Linmas Kelurahan Sriwedari, sesungguhnya masyarakat Kelurahan Siwedari merasa resah karena jalan pintas yang menjadi akses menuju Taman Sriwedari sering digunakan sebagai tempat untuk pacaran. Kondisinya jalan dengan penerangan seadanya, remang-remang menjadi salah satu pemicu. Selain itu di Taman Sriwedari juga tidak ada linmas/satpam yang menjaga dan tidak dilakukan penarikan retribusi.

Kerawanan sosial yang sering terjadi dikecamatan Serengan diantaranya adanya peredaran narkoba yang datang dari luar daerah seperti dari Kabupaten Sukoharjo hal ini terjadi karena mudahnya mobilitas dari Kota Sukoharjo ke Kota Surakarta. Salah satu kasus yang terjadi adalah tertangkapnya seorang pelajar kelas II SMK di Kota Solo, RS, 17, yang memanfaatkan waktu luang menjadi kurir sabu-sabu (SS) di sela-sela aktivitas belajarnya. RS rela menjadi kurir SS lantaran tergiur dengan upah yang diberikan senilai Rp 60.000 untuk sekali antar barang haram itu ke pembeli.

Informasi yang dihimpun Solopos.com di Mapolsek Serengan, Selasa (10/5/2016), terkuaknya RS menyambi sebagai kurir narkoba setelah polisi mengembangkan kasus penangkapan narkoba sebelumnya. Polisi lantas mengintai RS di sela-sela aktivitas sekolahnya maupun selepas pulang sekolah. Menurut Kapolestra Kota Surakarta, selain narkoba Kecamatan Serengan juga merupakan salah satu kecamatan yang rawan kriminalitas.

Kelurahan Kastelan merupakan tempatnya kerawan sosial yang paling tinggi di Kecamatan Banjasari, dikarenakan faktor ekonomi yang tinggi dan menekan

kehidupan yang layak. Salah satu pekerjaan yang mudah dan mendapatkan penghasilan yang lumayan, yaitu menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Dengan didukung banyaknya Hotel dan tempat hiburan malam di wilayah tersebut maka praktek prostitusi sangat mudah dilakukan.

Sejak Pemkot Surakarta menutup lokalisasi pelacuran Silir, Semanggi, secara kasat mata tidak ada lagi pekerja seks komersial (PSK). Tetapi aktivitas pekerja seks di Kota Solo makin liar. Data Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek HAM) menunjukkan jumlah PSK yang mengais rejeki di Solo mencapai 1.300, semuanya ilegal. Pekerja Seks Komersial itu praktek dikawasan Gilingan, Kestalan (Kecamatan Banjarsari) serta Kerten (Kecamatan Laweyan). Ketiga lokasi pemuas syahwat lelaki tersebut diantaranya kawasan RRI, kawasan Terminal Tirtonadi, serta kawasan Purwosari. Kedoknya pun beragam, ada yang terang-terangan, tempat panti pijat hingga salon kecantikan.

Kecamatan Jebres terdiri dari Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Jebres, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Tegalharjo, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Sewu, Kelurahan Jagalan. Di wilayah tersebut rawan terjadinya Banjir, sebab wilayah wilayah tersebut dilalui oleh aliran sungai besar. Ketika air sungai meluap, pemukiman sekitar bantaran sungai tersebut pasti terkena banjir. Selain itu juga wilayah tersebut merupakan dataran rendah, dan banyak juga terjadi penyumbatan pada saluran air. Akibatnya setiap hujan besar akan terjadi banjir, dikarenakan sungai tidak mampu menampung debit air. Dari pihak Pemerintahan sudah mencoba membuat saluran air yang lebih besar, pengerukan dasar tanah sungai, pembersihan sekitar bantaran sungai.

Kasus kriminalitas yang paling sering terjadi di Kecamatan Pasar Kliwon adalah penjabretan di kelurahan Pasar Kliwon, Kampungbaru, Buluwarti, karena tempat kelurahan tersebut terletak di pusat kota yang merupakan wisata belanja bagi wisatawan yang berkunjung, baik yang datang dari Kota Surakarta sendiri ataupun luar Kota Surakarta. Penjabretan terjadi disebabkan oleh kurang waspadanya warga masyarakat akan situasi disekitar mereka sendiri, selain itu

keteledoran dan kelengahan masyarakat juga sebagai pemicu terjadinya penjambretan.

Kasus kriminalitas yang sering terjadi di Kecamatan laweyan diantaranya penjambretan, pencurian, penipuan, dan pemerasan. Hal itu terjadi karena Laweyan berada di perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan pelaku penjambretan kebanyakan datang dari Kabupaten Sukoharjo. Di jembatan Kelurahan Laweyan yang berbatasan langsung Desa Grogol Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu tempat yang sering terjadi kasus kriminal penjambretan dan saat dilakukan pengejaran, si pelaku melarikan diri ke Kabupaten Sukoharjo sehingga linmas tidak bisa melakukan pengejaran karena tidak adanya koordinasi dari linmas wilayah Kota Surakarta dengan linmas Kabupaten Sukoharjo sehingga sampai saat ini penjambretan sering terjadi karena tidak adanya tindak lanjut untuk mengatasi terjadinya kriminalitas di wilayah tersebut.

Kriminalitas di wilayah Polsek Pasar Laweyan selama lima tahun terakhir ini fluktuatif cenderung menurun, pada tahun 2011 terjadi 408 tindak kriminalitas yang dilaporkan di Polsek Laweyan, kondisi ini menurun di tahun 2012 dan 2013 menjadi 432 kasus dan 2014 menjadi 144 kasus, dan cenderung menurun menjadi 83 kasus di tahun 2015.

Peristiwa kriminalitas yang sering terjadi di kecamatan serengan yaitu pencurian, penjambretan, terorisme pesta miras dan adanya KDRT. Pencurian yang sering terjadi yaitu karena adanya warga yang masih kurang peduli antara satu dengan yang lain dan kurang mengenal antara satu dengan yang lain sehingga banyak peristiwa pencurian yang menggunakan motif bertamu sehingga warga yang tidak mengenalnya tidak mencurigai pelaku tersebut, selain itu, dari beberapa kasus pencurian yang pernah terjadi justru maling yang mengawasi aktifitas linmas sebelum mencuri karena pernah terjadi rumah yang hanya jarak beberapa menit setelah dipatrol mengalami kebobolan pagar dan telah dimasuki maling.

Selain adanya pencurian penjambretanpun kerap terjadi di kecamatan laweyan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak keamanan dan warga yang tak acuh jika melihat adanya penjambretan dan tidak mau berusaha

untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga kejadian penjambretan selalu terjadi berulang ulang karena tidak adanya penegakan hukum.

Kejadian terorisme juga pernah menimpa diwilayah kecamatan serengan tepatnya dipos polisi depan mall matahari yang mengakibatkan 1 polisi meninggal dan terorisme yang saat itu juga diburu oleh densus 88 yang akhirnya ditembak mati setelah mengalami pengejaran, hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat masih kurang peduli dengan keadaan sekitar dan kurang mau mengawasi jalannya kemanan di kota Surakarta agar menjadi lebih tertib.

Budaya lama minum minuman keras sulit untuk diberantas karena susah untuk ditindak karena banyak yang melalukannya dan jika akan dikenai sanksi budaya pesta miras itu menghilang namun jika linmas mengalami sedikit lengah dalam pengawasan adanya budaya tersebut kembali seperti semula, seharusnya masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup sehat untuk tidak meminum minuman keras dan bagi warga sekitar saling menyadarkan dan melpor jika terjadi pesta miras sehingga budaya pesta miras dapat dihilangkan.

Kriminalitas di wilayah Polsek Serengan selama lima tahun terakhir ini cenderung menurun, pada tahun 2011 terjadi 133 tindak kriminalitas yang dilaporkan di Polsek Serengan, kondisi ini meningkat di tahun 2012 dan 2013 menjadi 158 kasus dan cenderung turun pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 62 kasus. Kriminalitas tertinggi adalah kausus pencurian, dan penipuan. Sebagai catatan kasus minuman keras juga cukup tinggi meskipun pada tahun 2015 sudah mulai berkurang.

Kecamatan Jebres pernah memiliki sejarah adanya keributan/ pertengkaran antar geng motor. Faktornya karena salah satu anggota geng motor A main ke wilayah kepatiham wetan. Lalu diketahui oleh geng motor B melihat seseorang yang memakai atribut geng motor A, kemudian oleh geng motor B orang tersebut dikeroyok dan ditelanjangi. Akibat hal itu orang dari geng A tersebut tidak terima dengan perlakuan dari geng B, kemudian geng A menyerang geng B dengan membawa banyak orang geng A menyerbu wilayah yang terdapat geng B. Terjadi perkelahian di wilayah tersebut, biasanya penyeranganya dilakukan pada malam

hari. Kemudian pihak kepolisianpun berjaga jaga untuk meredam aksi geng A. Setelah itu ketua dari masing masing geng tersebut, dipanggil oleh kepolisian dan didamaikan. Di Kecamatan Jebres pun banyak sekelompok orang yang dicurigai telah meminum minuman keras (mabuk).

Kecamatan Banjarsari letaknya perbatasan dengan Kabupaten Karang Anyar, terdiri dari beberapa Kelurahan, diantaranya : Kelurahan Keprabon, Kelurahan Timuran, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Punggawan , Kelurahan Kestalan, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Kadipiro , Kelurahan Banyuanyar, Kelurahan Sumber , Kelurahan Manahan, Kelurahan Mangkubumen, Kelurahan Setabelan .

Kasus kriminalitas tertingi di Kecamatan Banjarsari adalah peredaran narkoba. Penyebaran Narkoba tersebut dipengaruhi karena adanya para pendatang baru yang ingin mencari pekerjaan dan orang orang yang ingin melanjutkan pendidikan. Ketika pekerjaan sulit untuk dicari dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, merekapun melakukan berbagai cara agar bisa bertahan hidup. Peredaran narkoba bermula dari rasa penasaran ingin mencobanya, setelah sudah menikmatinya dan didorong harga narkoba yang mahal. Merekapun biasanya mencoba untuk menjualnya, selain keuntungan yang besar, merekapun bisa dengan Cuma Cuma mengkonsumsi narkoba. Tempat peredarannya biasanya ditempat kost – kost dan di salon. Warga sekitar tidak ada yang mengetahui dengan adanya hal tersebut, mereka tahu dengan hal tersebut ketika pihak kopolisian sudah menggrebek dan melakukan penangkapan pada sipelaku tesebut. Karena kurang adanya kepekaan dan kontrol sosial dari masyarakat, peredaran narkobapun mudah berjalan diwilayah tersebut.

Memperhatikan temuan diatas, secara spesifik perpektif inklusi ditemukan dalam kasus KDRT, pelecehan sexual, perzinahan, perkosaan, bahkan termasuk penipuan dengan korban kelompok inklusi. Hal ini menjadi persoalan besar manakala dibiarkan terus menerus. Siapaun korban dan pelaku maka kerawanan sosial harus diminimalisir. Beberapa kelurahan mendominasi munculnya beberapa keerawanan sosial.

Kecamatan Pasar Kliwon merupakan pusat berkumpulnya berbagai organisasi kemasyarakatan dan kelompok agama dari berbagai golongan, sehingga wilayah ini paling rawan terjadinya konflik dengan kekerasan. Kekerasan biasa berangkat dari kesalahpahaman antar individu, namun terdapat pula akibat subordinasi satu terhadap yang lain, seperti kelompok preman dengan pedagang. Kelurahan yang paling dianggap rawan adalah Semanggi, Sangkrah, Kedunglumbu, Kampung Baru, dan Pasar Kliwon sendiri. Dalam perspektif inklusi, kerawanan ada pada kasus perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, KDRT, pelacuran, dan minuman keras.

Kecamatan Laweyan merupakan kecamatan yang terletak di sebelah barat Kota Surakarta. Kecamatan ini terkenal karena penduduknya banyak yang menjadi produsen dan pedagang batik, sejak dulu sampai sekarang. Kelurahan yang paling banyak terjadi kerawanan sosial adalah Karangasem, Pajang, Penumping, Sondokan, Sriwedari, Purwosari dan Pasar Jongke. Tidak ada kasus KDRT, pelecehan dan perkosaan yang dilaporkan.

Kecamatan Serengan merupakan kecamatan yang terletak di selatan Kota Surakarta yang terdiri dari tujuh kelurahan. Dinamika kondisi masyarakat yang heterogen di Kecamatan Serengan bisa menjadi sebuah potensi dan permasalahan di Kecamatan Serengan. Dimana masyarakat yang heterogen rentan terhadap konflik yang muncul karena perbedaan nilai-nilai budaya dan norma dasar akan sulit disesuaikan antara masing-masing agama, akan selalu bertentangan dan ini memudahkan munculnya sebuah konflik. Berikut pemetaan wilayah kriminalitas di Kecamatan Serengan. Kelurahan yang paling rawan sosial adalah Joyotakan, Danu Kusuman, Kratonan, dan Tipes. Sedangkan kasus kerawanan sosial inklusif adalah perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, KDRT dan pemalakan.

Dari berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri oleh berbagai kalangan baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi baik profesi, kemasyarakatan, pemuda pun perempuan. Pengendalian diri yang luas mencakup lapisan masyarakat

merupakan kondisi dimana satu dengan yang lain menjaga keadaan. Inilah pengendalian sosial.

Menurut Peter L. Berger (1990) pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Menurut Joseph S. Roucek seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2002) mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah proses baik terencana maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa semua warga masyarakat agar mematuhi kaidah sosial yang berlaku. Dengan demikian pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan guna mengajak, mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, serta mengikat semua warga untuk melakukan sesuatu yang disepakati dan diamanatkan bersama.

Pengendalian sosial dapat dikategorikan berdasarkan sifat-sifatnya yaitu : (1) pengendalian preventif, dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap sistem nilai dan sistem norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat; (2) pengendalian sosial yang bersifat represif yaitu pengendalian yang dilaksanakan setelah terjadi pelanggaran terhadap sistem nilai dan sistem norma yang disepakati bersama yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala sehingga kehidupan menjadi normal kembali; (3) pengendalian gabungan yang merupakan perpaduan antara preventif dan represif, dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan sekaligus untuk memulihkan kembali agar keadaan kembali normal seperti sedia kala; (4) pengendalian persuasif yaitu pengendalian yang dilakukan melalui ajakan, himbauan, arahan, dan bimbingan kepada anggota masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang positif ; dan (5) pengendalian sosial secara kurasif adalah pengendalian yang dilakukan melalui ancaman dan kekerasan.

Pengendalian sosial tidak dapat berdiri sendiri. Setiap kejadian pergolakan sosial membutuhkan penanganan khusus namun bersama-sama. Penangan khusus ini diperlukan untuk menghindari benturan sosial yang lebih besar lagi berupa *rush* , situasi sosial yang mencekam. Secara sosial, untuk mencapai pengendalian sosial

yang efektif beberapa orang atau kelompok membentuk cara yang unik sesuai dengan kejadian sosial yang dialami. Secara individual dan berkelompok dapat dilakukan : (1) cemoohan atau ejekan, yaitu masyarakat akan mencemooh atau mengejek individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan, yang hal ini merupakan hukuman yang sangat berat bagi si pelaku penyimpangan, bahkan dapat lebih menyakitkan dibandingkan dengan hukuman fisik. ; (2) desas-Desus atau gosip yang dapat menyebabkan rasa malu bagi yang digosipkan, karena kritik yang disampaikan tidak dapat dikomunikasikan; (3) pendidikan, baik yang dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat merupakan salah satu cara pengendalian sosial yang telah melembaga di masyarakat, melalui pendidikan, warga masyarakat dibimbing untuk mematuhi nilai dan norma masyarakat sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang; (4) *ostrasisme* yaitu menunjuk pada tindakan membiarkan seseorang hidup dan bekerja dalam kelompok itu, tetapi tidak seorang pun berbicara dengannya, bahkan ditegur pun tidak; (5) *fraudulens* merupakan bentuk pengendalian sosial yang umumnya terdapat pada anak kecil; (6) teguran yaitu cara pengendalian sosial melalui perkataan atau tulisan secara langsung; (7) agama memberikan pedoman kepada para pemeluknya tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan; (8) intimidasi yaitu cara pengendalian sosial yang dilakukan dengan paksaan, biasanya dengan cara mengancam atau menakut-nakuti; (10) kekerasan fisik yang digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang antara lain memukul, menampar, dan melukai, namun kekerasan fisik ini mencerminkan ketidaksabaran seseorang dalam menangani suatu masalah, termasuk masalah perilaku menyimpang; dan (11) hukum yaitu merupakan alat pengendalian sosial yang secara nyata memberikan sanksi terhadap pelaku penyimpangan, karena aturan hukum yang jelas dengan sanksi yang tegas, dapat mengendalikan setiap anggota masyarakat terhadap pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku

Menurut Sunarto (2000), pengendalian sosial memiliki empat pola, yaitu : (1) pengendalian kelompok terhadap kelompok yaitu apabila suatu kelompok mengawasi perilaku kelompok lain, misalnya polisi mengawasi masyarakat; (2)

pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, yaitu apabila suatu kelompok menentukan perilaku anggota-anggotanya, misalnya suatu perusahaan yang mencatat seorang karyawannya yang telah berbuat kriminal menggelapkan uang perusahaan; (3) pengendalian individu terhadap kelompok, dan (4) pengendalian individu terhadap individu lainnya yaitu apabila individu melakukan pengawasan terhadap individu lain, misalnya ibu mengawasi anaknya. Pengendalian sosial akan berdampak pada tata cara individu bermasyarakat. Individu dalam masyarakat yang dapat dikendalikan dengan baik akan mengurangi kerentanan sosial yang pada akhirnya akan mengurangi konflik dalam masyarakat.

Guna mengurangi kerawanan sosial, beberapa upaya dilakukan yaitu dengan mengembangkan model deteksi dini. Menurut UND/UNISDR deteksi dini adalah suatu mekanisme yang berupa pemberian informasi secara tepat waktu dan efektif, melalui institusi yang dipilih, agar masyarakat/ individu di daerah rawan mampu mengambil tindakan menghindari atau mengurangi resiko dan mampu bersiap-siap untuk merespon secara efektif. Deteksi dini merupakan upaya memberitahukan kepada warga yang berpotensi dilanda suatu masalah untuk menyiagakan mereka dalam menghadapi kondisi dan situasi suatu masalah.

Fungsi dari deteksi dini antara lain: untuk mengetahui lebih awal akan kemungkinan terjadinya suatu konflik, untuk menghindari keterkejutan akan terjadinya suatu konflik dan menyiapkan lebih awal langkah-langkah penanggulangan konflik apabila konflik yang sudah terdeteksi tidak dapat dicegah. Model Deteksi Dini dapat dimulai dari : (1) pemahaman konflik yang sudah pernah terjadi (database konflik) seperti pemetaan konflik (yang sudah pernah terjadi dan upaya penyelesaiannya), koordinasi antar instansi yang terkait, dan menguatkan peran serta masyarakat. (2) Pemahaman tentang indikasi terjadinya konflik baru yang dapat diteksi melalui pemahaman tentang situasi dan kondisi terkini (*current affairs*), memahami reaksi masyarakat, memahami peristiwa yang menyertai/muncul pada tahap awal indikasi adanya konflik, pengumpulan dan pemetaan dari peristiwa-peristiwa yang ada dan koordinasi antar instansi yang terkait. (3) Peran serta masyarakat lebih kepada lingkaran terluar dalam sistem deteksi

dini konflik dan pengamanan. Peran lingkaran luar adalah masyarakat dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan tentang hal-hal mencurigakan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Hal ini bias dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat bersentuhan langsung dengan kondisi sehari-hari di lapangan dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga adanya info-info mengenai indikasi kemunculan suatu konflik dapat lebih mudah diketahui. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan pusat Informasi/pusat Informasi terutama di daerah yang dinilai rawan terhadap konflik. Sedangkan peran sebagai pengamanan adalah masyarakat berperan untuk menjaga situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat agar tetap aman, dan terhindar dari upaya-upaya untuk terjadinya konflik dengan cara membangun kesadaran diri dan masyarakat serta pengawasan melekat terhadap lingkungan sekitar.

Pemerintah daerah dalam menanggulangi kerawanan sosial memiliki urusan yang wajib dilaksanakan yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Sosial. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari tiga (3) sub urusan yaitu : Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakara. Urusan sosial mencakup enam sub urusan yaitu pemberdayaan sosial penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan rehabilitasi sosial perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan bahwa model yang paling efektif dalam penanggulangan kerawanan sosial adalah model pengembangan deteksi dini. Deteksi dini menjadi awal pencegahan karenanya menjadi urgen bagi pemerintah untuk mengelola deteksi dini dengan baik.

SIMPULAN

Kerawanan Sosial di Surakarta terbentuk dalam berbagai macam seperti kerawanan ekonomi, politik, budaya, ideologi, ras dan agama, lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan. Tingkat kriminalitas Surakarta menempati urutan ke dua setelah Kota Semarang. Solo dianggap sumbu pendek dari situasi masyarakat yang dinamis dan berpenduduk banyak terutama pendatang. Beberapa kejadian

kriminalitas sudah sampai pada batas rentan seperti peredaran narkoba dan kenakalan remaja.

Deteksi dini atas konflik sosial hampir sulit diketahui oleh masyarakat. Masyarakat makin menipis sense of belonging terhadap kondisi lingkungan. Gejala-gejala baru diketahui setelah kejadian terjadi. Deteksi Dini secara intensif dilakukan aparat keamanan baik polisi maupun TNI, serta Linmas. Operasi rutin menjadi dasar sebagai deteksi dini. Secara khusus belum ada deteksi tiap kerawanan sosial maupun kriminalitas. Pola umum dianggap efektif sebagai deteksi dini. Tingkat koordinasi antar instansi cukup baik, rutin dan dilaksanakan dalam forum-forum yang saling melaporkan data. Respon masyarakat terhadap kerawanan sosial dan kriminalitas makin berkurang. Ini akibat dari gejala sosial yang makin kompleks yang mengakutkan ingkat egoisme yang tinggi dalam masyarakat.

Perlu ada peta kerawanan sosial dan kriminalitas yang dapat menggambarkan secara detail lokasi kerawanan sosial bukan saja yang bersifat sementara namun terus ter up date dan merumuskan strategi deteksi dini untuk memudahkan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan maupun penanganan konflik dan kriminalitas.

Hal ini didukung data base kerawanan sosial dan kriminalitas sehingga menjadi bagian penting dalam strategi deteksi dini. Untuk itulah perlunya meningkatkan patisipasi masyaraka dalam mencegah dan menaggulangi kejadian kerawanan sosial dan kriminalitas di lingkungan terdekat masyarakat. Dengan demikian akan menjadi mudah dalam penanganan berbagai kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen Bruce J, 2009, Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. (2007), Educational research: An introduction (8th ed.). Boston: Pearson.
- Hyejin, Kim, at all, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225027/>

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1

Kertati, Indra. *Dekonstruksi dan Patologi Sosial: Studi Kasus pada Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Solo Raya*

https://scholar.google.com/citations?user=NhJcPsAAAAJ&hl=en&authuser=1#d=gs_md_citad&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DNhJcPsAAAAJ%26authuser%3D1%26citation_for_view%3DNh-JcPsAAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420

Sunarto, SE., MM 2000. *Perilaku organisasi, Edisi 2*, Penerbit: Amus: Yogyakarta

<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html>

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/11/29/351778/penderita-hiv-aids-di-surakarta-lampau-estimasi-nasional>

<http://martin89-martinsblog.blogspot.co.id/> atau

<https://ceritaciel.wordpress.com/2008/04/25/geliat-naga-di-bumi-surakarta/>

<https://www.studilmu.com/blogs/details/pengertian-inklusif-dan-5-hal-yang-dilakukan-pemimpin-inklusif>.